



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

LAPORAN KINERJA



KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT 2023

www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar
Jl. Letjen Sutoyo No.122 Pontianak



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT TA.2023



NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

1. INTEGRITAS

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral

2. PROFESIONALISME

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

3. SINERGI

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

4. PELAYANAN

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

5. KESEMPURNAAN

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

- i. Halaman Judul
- ii. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
- iii. Daftar Isi
- iv. Daftar Tabel
- v. Daftar Gambar
- vi. Pengantar Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat
- ix. Ringkasan Eksekutif

BAB I

PENDAHULUAN

- 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 11. Peran Strategis Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat
- 14. Sistematika Laporan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- 16. Penetapan Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 21. Capaian Kinerja Organisasi
- 34. Realisasi Anggaran
- 35. *Achievement* Kanwil DJKN Kalbar

BAB IV

PENUTUP

DAFTAR TABEL

SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 1.1 KOMPOSISI PEGAWAI PADA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN

Tabel 1.2 KOMPOSISI PEGAWAI PADA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN

Tabel 1.3 KOMPOSISI PEGAWAI PADA KPKNL SINGKAWANG BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN

Tabel 1.4 KOMPOSISI PEGAWAI PADA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN PENDIDIKAN

Tabel 1.5 KOMPOSISI PEGAWAI PADA KPKNL PONTIANAK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN PENDIDIKAN

Tabel 1.6 KOMPOSISI PEGAWAI PADA KPKNL SINGKAWANG BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN PENDIDIKAN

PETA STRATEGI

Tabel 2.1 SASARAN STRATEGIS DAN URAIAN IKU

ANGGARAN

Tabel 2.2 RINCIAN ANGGARAN KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT 2023

CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1 PERSPEKTIF CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.2 PERBANDINGAN TARGET, REALISASI IKU DAN INDEKS TANPA BATAS

Tabel 3.3 NILAI NKO PADA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN 2023

Tabel 3.4 PERKEMBANGAN NKO PADA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 S.D. 2023

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

Tabel 1.2 WILAYAH KERJA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

Tabel 1.3 STRUKTUR ORGANISASI KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

Tabel 1.4 TABEL KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Tabel 1.5 KOMPOSISI PEGAWAI KESELURUHAN BERDASARKAN GOLONGAN PENDIDIKAN

Tabel 1.6 IKHTISAR SASARAN STRATEGIS

Tabel 1.6 PERKEMBANGAN NKO KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT



PENGANTAR

KEPALA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT



".... Semangat untuk selalu memberikan pelayanan dan kinerja terbaik Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat selama tahun 2023 dibuktikan dengan Capaian Nilai Organisasi Kanwil DJKN Kalbar sebesar 115,83%, meraih berbagai prestasi dan pengembangan inovasi yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat.."

115,83%

NILAI KINERJA ORGANISASI

Tahun 2023 Indonesia sudah mulai dihadapkan dengan kondisi pandemi yang berubah statusnya menjadi endemi perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023. Virus Covid-19 yang cukup stabil dan konsisten membawa perubahan baik yang patut diapresiasi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sistem ketahanan kesehatan Indonesia selama pandemi ini berjalan dengan baik dan juga mulai mempengaruhi berbagai aspek kehidupan antara lain ekonomi, sosial, dan kejiwaan/psikologi.

Kanwil DJKN Kalimantan Barat menghadapi efek positif yang sama. Setelah pandemi ini telah menguji *resiliensi* kami, dimana kami terus dituntut untuk mampu keluar dari kondisi ini dengan memiliki kemampuan beradaptasi secara positif dan tetap teguh dalam menghadapi situasi sulit. Dengan kemampuan beradaptasi ini, kami lebih tenang dan menghindari kepanikan serta menumbuhkan keyakinan untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan pandemi Covid-19.

Berakhirnya pandemi tidak berarti tantangan semakin mudah. Pemerintah masih dihadapi oleh memanasnya dinamika global akibat tensi geopolitik. Namun di tengah ketidakpastian global

saat ini Indonesia harus terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Selain tensi geopolitik, Menteri keuangan menekankan bahwa ancaman kemunculan pandemi, perubahan iklim, dan digitalisasi menjadi tantangan yang perlu diwaspadai ke depan. Menteri Keuangan menyebut bahwa hal-hal tersebut akan menjadi *game changer* dan mengubah konstelasi global.

Ditengah tantangan ini Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus mendukung dan membangun pikiran positif untuk tetap optimis memberikan kinerja yang terbaik. Dengan sikap positif tersebut maka seluruh pegawai akan memandang tantangan ini menjadi pemantik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh stakeholder. Kepedulian dan semangat pegawai memunculkan antusiasme untuk bersama menghasilkan kinerja terbaik dalam setiap pekerjaannya.

Dalam memberikan pelayanan terbaik, Kanwil DJKN Kalimantan melakukan inovasi-inovasi antara lain pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pelayanan Manajemen Aset Negara (SIMPELMAN) bekerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, dan E-Area Pelayanan Terpadu. Selain itu, Kanwil DJKN Kalimantan Barat melakukan inovasi percepatan SOP layanan dan aktif menyampaikan publikasi melalui media elektronik yaitu TVRI dan RRI Kalimantan Barat, media cetak lokal harian Pontianak Post, media sosial, dan website. Hal ini

dilakukan sebagai upaya memberikan informasi objektif kepada masyarakat dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik akan upaya Pemerintah dalam melakukan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, pelayanan publik dan isu-isu lainnya.

Perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat tertuang dalam Laporan Kinerja yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan LKj Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor 4493/KN.1/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023.

Selama tahun 2023, Kanwil DJKN Kalimantan Barat telah melaksanakan berbagai program kerja dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi

Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2023 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil Kalimantan Barat tahun 2023 mencapai **115,83%**. Hal ini merupakan keberhasilan bersama seluruh pegawai Kanwil DJKN Kalimantan Barat, kerjasama dan sinergi yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Dalam LKj akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2023 dengan Kontrak Kinerja tahun 2023, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan sebagai acuan kami dalam memfokuskan kemampuan terbaik untuk mencapai kinerja yang maksimal. Selain itu, dalam LKj ini diuraikan hal yang mendukung pencapaian target, kendala dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dimaksud. Pencapaian IKU Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2023 terdiri dari 20 IKU berstatus hijau.

Di tengah tantangan yang dihadapi semakin *challenging*, dari perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan inovasi, perbaikan proses bisnis dan peningkatan pelayanan. Dengan membawa semangat nilai-nilai organisasi

yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan kita bersama dan dapat melayani dengan lebih baik serta memberikan kontribusi nyata untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera.

Semangat serta kinerja terbaik yang dilakukan oleh segenap jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat di tahun 2023 juga dibuktikan dengan meningkatnya NKO Tahun 2023 sebesar 1,14% dari capaian NKO Tahun 2022 sebesar 114,69%.

Selain itu, Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengapresiasi atas kerjasama dan sinergi seluruh pihak dan seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan layanan kami. Kanwil DJKN Kalimantan Barat berharap agar kerjasama dan sinergi yang selama ini telah berjalan

dapat dilanjutkan serta berjalan lebih baik lagi guna mendukung upaya mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Selaras dengan komitmen kami untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan tuntas serta *mind set* yang sama bagi pejabat dan pegawai dengan motto kami SEMPURNA (semangat, proaktif, tulus, ramah dan amanah) dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi yang diemban. Semoga Kanwil DJKN Kalimantan Barat menjadi instansi vertikal DJKN yang lebih baik dan memberikan kontribusi terbaik untuk Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Kalimantan Barat



Ditandatangani secara elektronik
Tetik Fajar Ruwandari



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang di dalamnya diuraikan secara ringkas rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat selama tahun 2023.

Dalam menunjang tercapainya tujuan strategis tersebut, maka telah disusun Peta Strategi DJKN tahun 2023 berdasarkan metodologi *Balanced Scorecard* (BSC) dimana konsep ini menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya.

Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudiandikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi Kemenkeu Two DJKN tahun 2023 mempunyai 4 perspektif yang saling

berhubungan, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 12 sasaran strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan IKU juga menganut prinsip SMART-C, yaitu *specific* (menyatakan sesuatu yang khas/unik), *measurable* (dapat diukur dengan jelas), *agreeable* (disepakati), *realistic* (dapat dicapai, namun menantang), *time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *continuously improved* (dapat menyesuaikan perkembangan strategi organisasi).

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2023 telah sesuai dengan target yang dengan ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar **115,83%**. Pencapaian IKU Kanwil DJKN Kalimantan Barat terdiri dari 20 IKU dengan 20 IKU berstatus hijau. Capaian IKU tahun 2023 yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

Kode	URAIAN IKU	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian			
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100,00%	115,11%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80,00%	139,12%
1c-CP	Indeks Integritas	88.67%	100,56%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	125,52%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	311,92%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan	68%	113,28%
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	153,38%
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	105,26%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	200,00%
4b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70%	135,99%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif			
5a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90,0%	111,11%
5b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	116,94%
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif			
6a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	110,66%
Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif			
7a-N	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	100%	132,79%
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal			

Kode	URAIAN IKU	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120,00%
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	120,00%
8c-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	200,00%
Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif			
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	142,52%
Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%
10b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	121,28%

Pada tahun 2023, pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Kalimantan Barat pasca dihadapkan dalam kondisi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) telah berjuang bersama menghadapi pandemi. Tiga tahun lebih berlalu covid-19 mulai menurun sampai dengan pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan mulai memasuki masa endemi. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus Covid-19 di Indonesia yang mendekati nihil. "Hasil sero survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19. Meskipun demikian pemerintah meminta agar tetap berhati-hati dan terus menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat.

Berakhirnya pandemi tidak berarti tantangan semakin mudah. Pemerintah masih dihadapi oleh memanasnya dinamika global akibat tensi geopolitik. Namun di tengah ketidakpastian global saat ini Indonesia harus terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Selain tensi geopolitik, Menteri keuangan menekankan bahwa ancaman kemunculan pandemi, perubahan iklim, dan digitalisasi menjadi tantangan yang perlu diwaspadai ke depan. Menteri Keuangan menyebut bahwa hal-hal tersebut akan menjadi *game changer* dan mengubah konstelasi global. Ditengah tantangan tersebut Untuk menghadapi ketidakpastian maka Indonesia harus mampu menciptakan resiliensi, dalam suasana yang tidak pasti harus dijaga dengan ketahanan ekonomi Indonesia.

Dihadapi dari ancaman kemunculan pandemi, perubahan iklim, dan digitalisasi hingga tensi geopolitik ini merupakan tantangan yang perlu diwaspadai ke depan. Oleh sebab itu Kanwil DJKN Kalimantan Barat berupaya untuk tetap beradaptasi dengan perubahan agar Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dapat mencapai target kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholders*.

Pelayanan Kanwil DJKN Kalimantan Barat tetap berjalan dengan baik dan masih menekankan pelaksanaan tugas dengan teknologi informasi. Selain itu, pelaksanaan tugas sudah dilakukan secara selektif dengan penugasan *Work From Office* (WFO), *Work From Home* (WFH) dan *Work From Homebase* (WFHB) istilah yang digunakan di Kementerian Keuangan adalah *flexible working space* merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Kondisi tersebut tidak menurunkan semangat dan integritas pegawai dalam melaksanakan tugas. Kanwil DJKN Kalimantan Barat senantiasa berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada *stakeholders* dengan melakukan inovasi dan perbaikan secara terus menerus.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai inovasi yang telah dikembangkan antara lain pengembangan aplikasi SIMPELMAN, aplikasi google calender, *spreadsheets weekly meeting* dan E-Area Pelayanan Terpadu, serta SOP percepatan layanan, penyusunan SOP integrasi layanan, perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan Universitas Tanjungpura, publikasi dan pelayanan secara proaktif serta solutif. Keberhasilan Kanwil DJKN Kalimantan Barat pada tahun 2023 juga ditunjukkan dengan beberapa penghargaan dan prestasi yang diperoleh antara lain :

1. Juara 1 Optimalisasi Aset Pada Pengguna Barang (Koin Mas 22/23).
2. Piagam Penghargaan sebagai Juara III Lomba Foto Ajang Kreativitas Insan Lelang Tahun 2023.
3. Capaian Nilai IKPA Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2022 (Kategori Pagu 500jt s.d. 2,5M).
4. Kerjasama dan dukungan dalam pelaksanaan penilaian barang milik daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Peringkat Pertama Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat Wilayah Kategori UAPPA-W Kemenkeu Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.
6. Penghargaan atas Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 118,56 periode Semester I 2023 dengan Predikat Istimewa

7. Penghargaan atas Peran Serta dan Kontribusi dalam Menunjang Pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak
8. Piagam Penghargaan sebagai Juara II Lomba Video Reel Internal Kemenkeu Tingkat Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat.



BAB I PENDAHULUAN

- A. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**
- B. PERAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT**
- C. SISTEMATIKA LAPORAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berpedoman pada Pasal 1237 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan



Gambar 1.1 Kanwil DJKN Kalimantan Barat

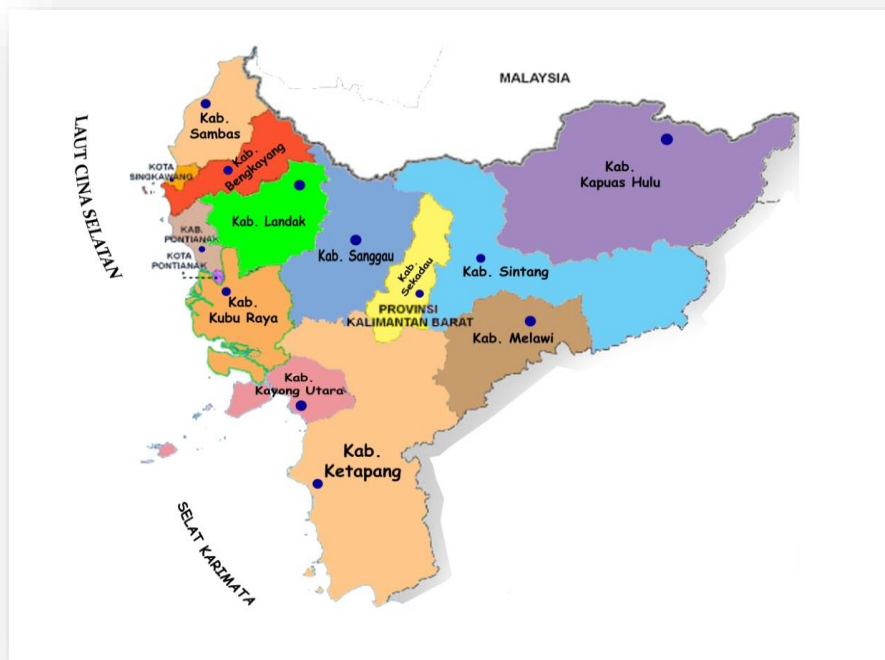
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat merupakan unit eselon II selaku instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo No. 122 Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01./2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat (Kanwil DJKN Kalimantan Barat) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kanwil DJKN Kalimantan Barat membawahi 2 (dua) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu KPKNL Pontianak, dan KPKNL Singkawang. KPKNL Pontianak berkedudukan di Kota Pontianak, tepatnya di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo Nomor 19 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. KPKNL Singkawang berkedudukan di Jalan Aliyayang Nomor 1, Kota Singkawang.

Gambar 1.2 Wilayah Kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat



Adapun wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meliputi 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

Kota /Kabupaten yang berada di wilayah kerja
KPKNL Pontianak

1. Kota Pontianak
2. Kabupaten Kubu Raya
3. Kabupaten Ketapang
4. Kabupaten Kayong Utara
5. Kabupaten Sanggau
6. Kabupaten Sekadau
7. Kabupaten Sintang
8. Kabupaten Melawi
9. Kabupaten Kapuas Hulu



Kota/Kabupaten yang berada di wilayah kerja KPKNL Singkawang

1. Kota Singkawang
2. Kabupaten Sambas
3. Kabupaten Bengkayang
4. Kabupaten Mempawah
5. Kabupaten Landak

Sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan industri pengolahan menjadi sektor penting yang menggerakkan perekonomian masyarakat Kalimantan Barat dengan luas wilayah kurang lebih 147.557 Km². Perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup berarti. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, masyarakat semakin kritis dan mengharap adanya peningkatan pula terhadap kualitas layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dalam menyikapi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang tersebut, jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan selalu berlandaskan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

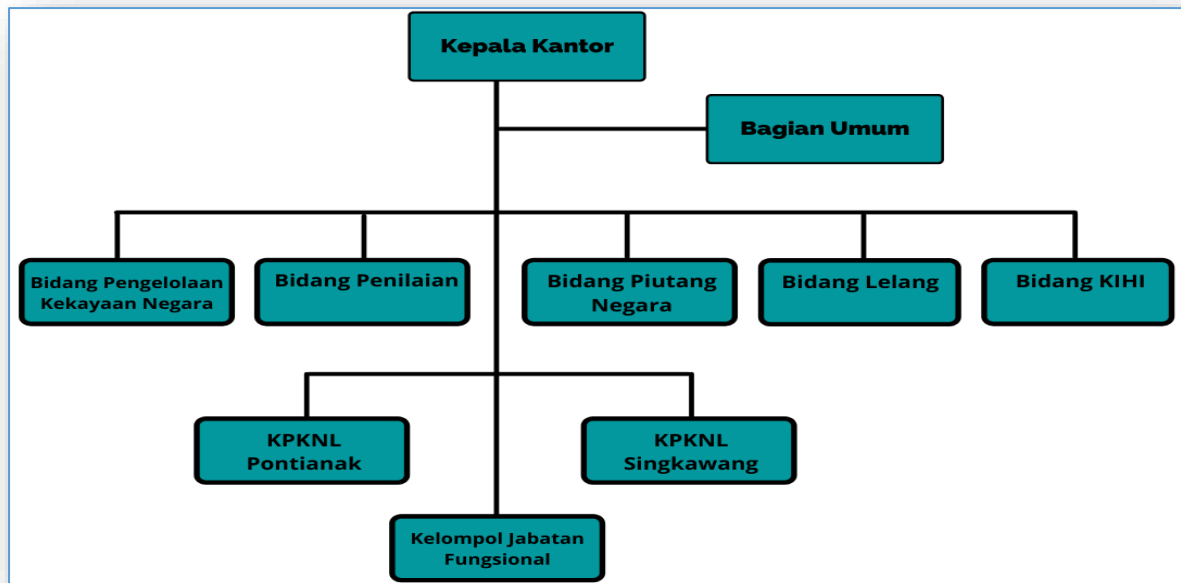
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat yang mempunyai peran koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang pada pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL di wilayah kerjanya, menjalankan fungsi, antara lain:

- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara;
- b. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penilaian;
- c. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan piutang negara;
- d. Pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
- e. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
- f. Pemberian bimbingan teknis penggalan potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;

- g. Pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Pembinaan terhadap penilai, usaha jasa lelang dan profesi pejabat lelang;
- j. Pelaksanaan dan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- k. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara;
- l. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kanwil DJKN Kalimantan Barat





Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01./2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan struktur organisasi 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) bagian umum, 5 (lima) bidang, dan kelompok jabatan fungsional. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat saat ini didukung oleh 2 (dua) kantor vertikal yaitu KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang.

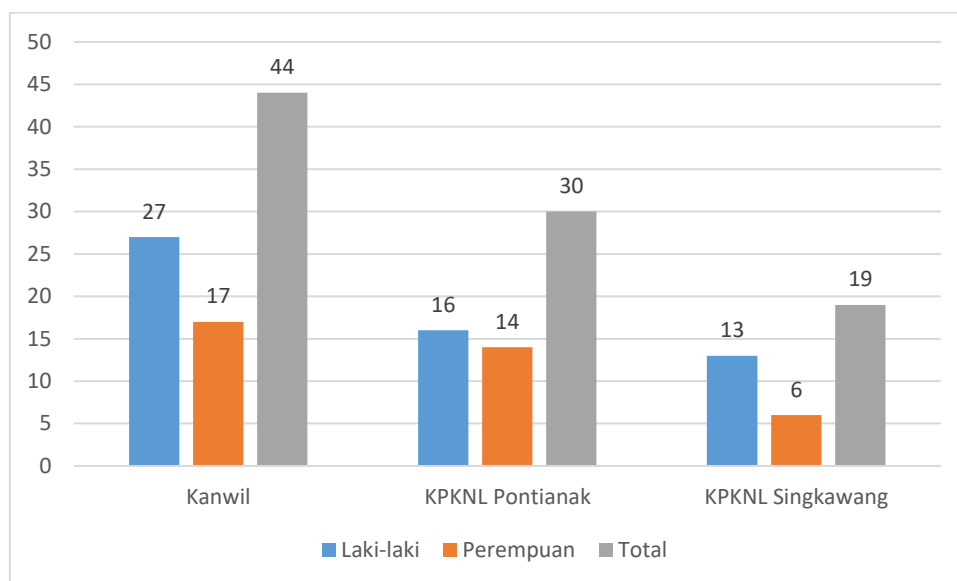
Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dipimpin oleh Kepala Kantor Tetik Fajar Ruwandari dibantu oleh Kepala Bagian Umum Fatchur Berlianto, Plt. Kepala Bidang KIH Pandaraman Lumbantoruan, Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Gunawan Sulisty, Kepala Bidang Penilaian Titik Wijayanti, Kepala Bidang Piutang Negara Rohmat, dan Kepala Bidang Lelang Rusmawati Damarsari.

Gambar 1.4 Foto Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat beserta Para Pejabat Eselon III



Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat didukung oleh 93 sumber daya manusia (SDM) dari berbagai bidang ilmu dan keahlian seperti ekonomi, keuangan, manajemen, hukum, komunikasi, teknik, administrasi, sosial, dan lainnya. Komposisi pegawai Kanwil DJKN Kalimantan Barat terbagi di unit Kanwil sebanyak 44 orang, KPKNL Pontianak sebanyak 30 orang, KPKNL Singkawang sebanyak 19 orang. Berdasarkan data jumlah pegawai dapat digambarkan data komposisi pegawai pada masing-masing kantor berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut.

Gambar 1.5 Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN

1. Unit Kerja : Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	0	4	16	5	25
Prempuan	0	6	10	3	19
Jumlah	0	10	26	8	44

2. Unit Kerja : KPKNL Pontianak

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai pada KPKNL Pontianak berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	0	4	9	3	16
Prempuan	0	6	8		14
Jumlah	0	10	17	3	30

3. Unit Kerja : KPKNL Singkawang

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai pada KPKNL Singkawang berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	0	2	10	1	13
Perempuan	0	4	2	0	6
Jumlah	0	6	12	1	19

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN

1. Unit Kerja : Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SLTA	0	4	4
D1	1	2	3
D3	4	4	8
D4/S1	14	5	19
S2	6	4	10
S3	0	0	0
Jumlah	25	19	44

2. Unit Kerja : KPKNL Pontianak

Tabel 1.5 Komposisi Pegawai pada KPKNL Pontianak berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Pendidikan

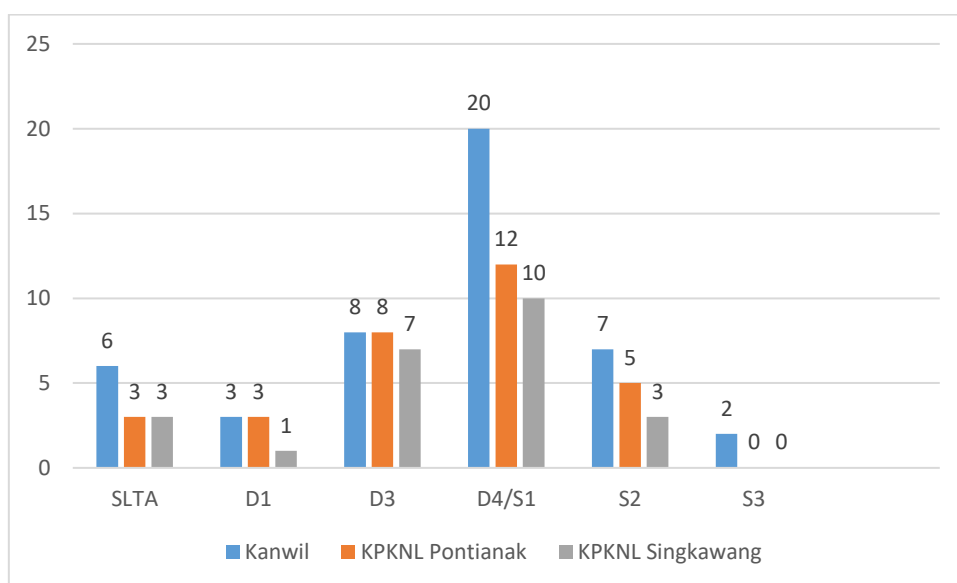
Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SLTA	2	0	2
D1	1	2	3
D3	4	3	7
D4/S1	3	9	12
S2	6	0	6
Jumlah	16	14	30

3. Unit Kerja : KPKNL Singkawang

Tabel 1.6 Komposisi Pegawai pada KPKNL Singkawang berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SLTA	4	0	4
D1	0	1	1
D3	0	3	3
D4/S1	7	1	8
S2	2	1	3
Jumlah	13	6	19

Gambar 1.6 Komposisi Pegawai Keseluruhan berdasarkan Golongan Pendidikan



Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat terus berkomitmen mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikutsertakan pegawai mengikuti diklat / *course* / *workshop* / *e-learning* atau mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan strata/ tingkat pendidikan yang dimiliki. Setiap pegawai yang telah mengikuti diklat / *course* / *workshop* / *e-learning* juga diwajibkan untuk melakukan *knowledge sharing* kepada seluruh pegawai. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini menjadi tuntutan guna memenuhi harapan masyarakat atas kualitas layanan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat.

C. PERAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat memiliki peran strategis dalam hal pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dan memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara. Adapun gambaran peran strategis tersebut adalah :

a. Melakukan pengelolaan kekayaan negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat memiliki peran untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara, dan difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara.

Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari penatausahaan aset (*asset administration*) menjadi manajer aset (*asset manager*) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat selaku Pengelola Barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.

Sebagai asset manager menerapkan optimalisasi aset juga terhadap gedung Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan menyewakan ruang pada sayap kiri gedung yang disewakan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Sutoyo, serta telah dipersiapkannya ruang pada sayap kanan gedung untuk dimanfaatkan oleh pihak ketiga (optimalisasi aset).

b. Melakukan penilaian kekayaan negara

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penilaian kekayaan negara meliputi pelaksanaan penilaian, kegiatan standardisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian. Hasil penilaian Barang Milik Negara tersebut antara lain akan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara, penerbitan surat berharga oleh Negara dan pengurusan Piutang Negara.

c. Memberikan pelayanan piutang negara

Pengurusan Piutang Negara adalah piutang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat, pengurusan piutang negara dilaksanakan Panitia Urusan Piutang Negara



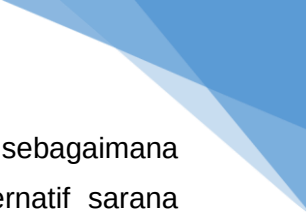
(PUPN) Cabang sebagai panitia interdepartemental yang diketuai oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan pengelolaan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari Kementerian Negara/ Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pemerintah Daerah.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan cq DJKN untuk meringankan Penanggung Utang (**PU**) yang terdampak ekonomi selama pandemi virus Covid-19 berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor (**PMK**) 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023. Dalam peraturan tersebut masyarakat khususnya PU diberikan *Crash Program* Keringanan Utang. Kanwil DJKN Kalimantan Barat, KPKNL Pontianak, dan KPKNL Singkawang bekerja sama untuk melakukan sosialisasi baik melalui media sosial maupun secara langsung kepada PU. Kebijakan ini sangat membantu masyarakat dalam penyelesaian utang kepada negara/ daerah.

Selanjutnya dengan PMK Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Kanwil DJKN Kalimantan Barat (**Kanwil**) telah menjalin kerjasama penagihan piutang negara dengan Universitas Tanjungpura (**Untan**) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor MO-1/WKN.11/2023/ Nomor 179/UN22/KU.01.01/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Penagihan Piutang Negara pada Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura. Kerja sama tersebut bagian optimalisasi penagihan piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan nilai sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per PU dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau tidak mempunyai nilai ekonomis.

Dalam rangka memperbaiki kualitas piutang daerah serta mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih bertanggung jawab menyelesaikan piutang daerah, pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN. Menindaklanjuti PMK tersebut, Kanwil telah melaksanakan sosialisasi kepada pemda diantaranya Kota Pontianak, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Mempawah. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan pemda mendapatkan pencerahan dalam pengelolaan piutang daerah.

d. Memberikan pelayanan lelang



Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana penjualan sebagaimana dimaksudkan oleh beberapa peraturan perundangan dan sebagai alternatif sarana transaksi penjualan aset kepada masyarakat.

Dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, lelang dicantumkan sebagai cara pelaksanaan (*execution*) putusan atau ketentuan perundangan tersebut. Lelang dipilih sebagai cara penjualan karena sifatnya yang transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya akta otentik berupa risalah lelang.

Peningkatan kualitas layanan, regulasi, pengawasan, penggalan potensi dan kemudahan pelaksanaannya terus menerus dilakukan dengan tujuan agar lelang menjadi sarana penjualan yang digunakan secara luas oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Untuk meningkatkan potensi penerimaan Pokok Lelang, PNBP Lelang, dan Produktivitas Lelang, Kanwil DJKN Kalimantan Barat senantiasa melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang ke pihak Perbankan, Satuan Kerja Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Barat.

D. Memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

Memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara yang diperoleh dari pemanfaatan Barang Milik Negara, hasil penjualan penghapusan Barang Milik Negara, Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang dari setiap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami laporan ini, sistematika LAKIN ini kami susun dalam kerangka sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada tugas, fungsi, struktur organisasi serta peran strategis Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023 beserta addendum kontrak kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada subbab ini disajikan hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2023.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Pada Renstra

Pada subbab ini diuraikan perbandingan antara IKU dan capaian Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan Sasaran Strategis 2020-2024.

B. Realisasi Anggaran

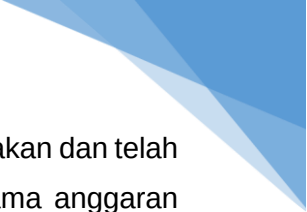
B.1 Belanja Pegawai

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, terutama anggaran belanja pegawai.

B.2 Belanja Barang

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, terutama anggaran belanja barang.

B.3 Belanja Modal



Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, terutama anggaran belanja modal.

Bab IV Penutup

Kesimpulan dan Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Harapan kami, laporan kinerja ini dapat menjadi cerminan kinerja dan prestasi yang telah diraih Kanwil DJKN Kalimantan Barat sekaligus menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur peningkatan kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat pada tahun yang akan datang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN KINERJA

Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat berpedoman pada visi dan misi DJKN 2020-2024. Visi DJKN 2020-2024 adalah mengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: menjadi pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

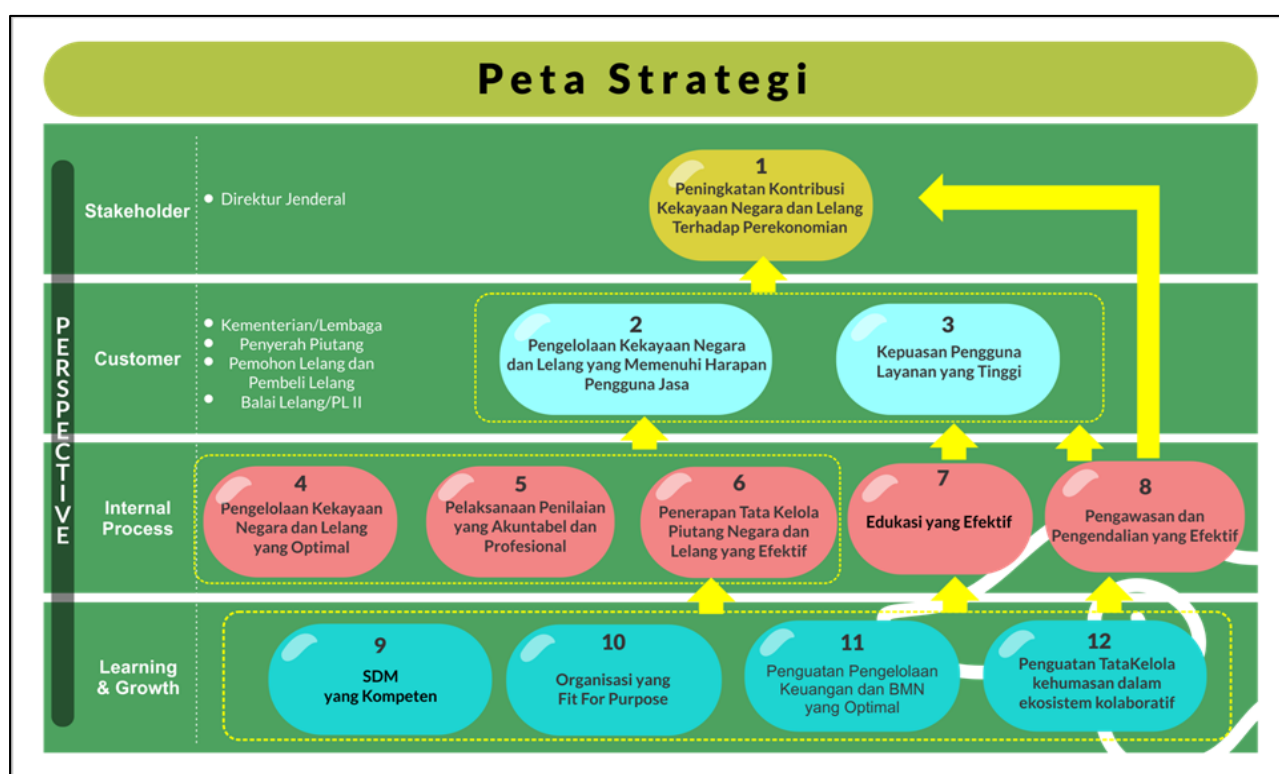
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan DJKN adalah: (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat perlu membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada waktu satu tahun. Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sementara itu, dokumen Penetapan/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2023 sesuai dengan peta strategis yang tertuang Kemenkeu *Two* terdiri dari 12 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun peta strategis Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

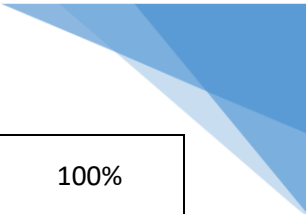
Gambar 2.1 Ikhtisar Sasaran Strategis



Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU dan keterkaitannya ada pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kepala Kantor Wilayah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Uraian IKU

Kode	URAIAN IKU	Target Tahun 2022
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian		
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
1c-CP	Indeks Integritas	88.67%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal		
3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan	68%



3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%
4b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif		
5a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90%
5b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif		
6a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif		
7a-N	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	100%
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal		
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas pelaksanaan anggaran	100%
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
8c-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif		
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60%
Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi		
10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80

Anggaran pada tahun 2023 beberapa kali mengalami revisi untuk mendukung program pemerintah dalam rangka penghematan. Adapun rincian anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rincian Anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2023

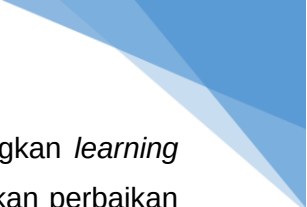
JENIS BELANJA	PAGU (Rp)		REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
	AWAL	AKHIR			
BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-	-
BELANJA BARANG	2,418,278,000	2,418,278,000	2,127,193,166	87.96%	291,084,834
BELANJA MODAL	889,749,000	889,749,000	878,700,000	98.76%	11,049,000
JUMLAH	3,308,027,000	3,308,027,000	3,005,893,166	90.87%	302,133,834

Untuk menerjemahkan strategi kedalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan karena beberapa faktor, antara lain :

1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan;
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan non-finansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang;
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang;
4. memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

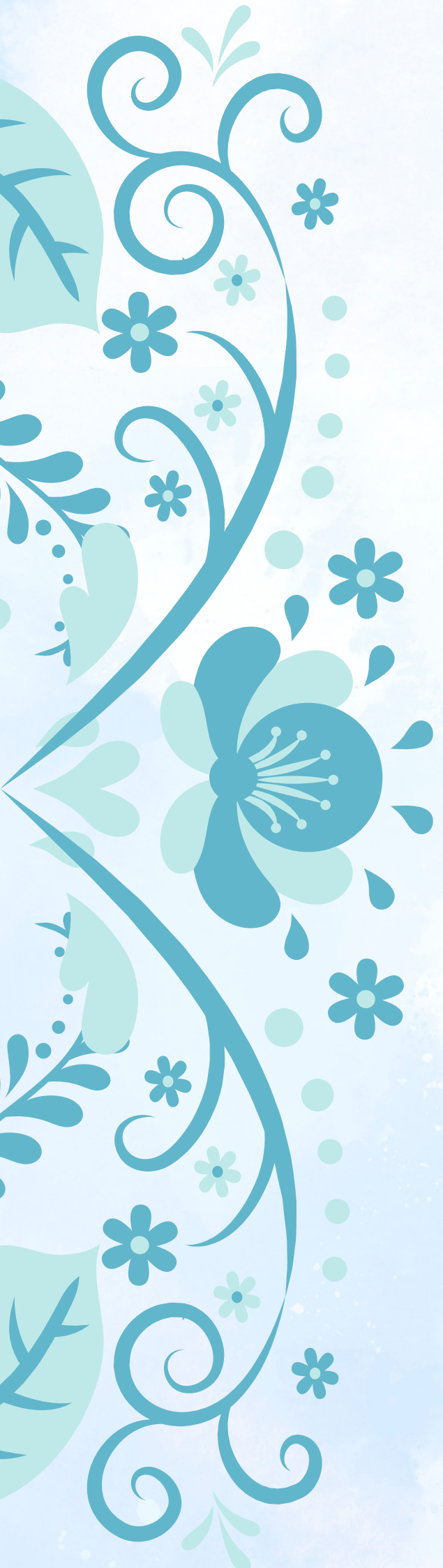
Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus menjadi landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi

Peta Strategi Kemenkeu *One* DJKN Tahun 2023 menerapkan 4 perspektif yang saling berhubungan, yaitu: ***stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective***. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa



yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 12 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan IKU juga menganut prinsip SMART-C, yaitu *specific* (menyatakan sesuatu yang khas/unik), *measurable* (dapat diukur dengan jelas), *agreeable* (disepakati), *realistic* (dapat dicapai, namun menantang), *time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *continuously improved* (dapat menyesuaikan perkembangan strategi organisasi).



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat selama tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), anggaran, dan kinerja lainnya yang dicerminkan dari inovasi, dan penghargaan yang memberikan manfaat baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat secara luas. Kanwil DJKN Kalimantan Barat senantiasa melaksanakan evaluasi internal melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) setiap bulan dan rabu strategis sebagai upaya monitoring dan memperkuat pengelolaan kinerja organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023 terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Two* Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2023, diperoleh **Nilai Kinerja Organisasi sebesar 115,83**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Perspektif Capaian Kinerja 2023

NO.	PERSPEKTIF	BOBOT PERSPEKTIF (%)	BOBOT CAPAIAN (%)
1	<i>Stakeholder</i>	30	33.21
2	<i>Customer</i>	20	24.00
3	<i>Internal proses</i>	25	28.62
4	<i>Learning & Growth</i>	25	30.00
Nilai Kinerja Organisasi		100	115.83

Rincian perbandingan target dan realisasi dari 20 (dua puluh) IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Perbandingan Target, Realisasi IKU dan Indeks Tanpa Batas

No	Uraian IKU	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Indeks Tanpa Batas
1	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	115.11%	115.11%
2	Persentase produktivitas lelang	80%	111.30%	120.00%
3	Indeks Integritas	88.67	89.17	100.56%
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	125.52%	120.00%
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	311.92%	120.00%
6	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan	68%	77.03%	113.28%
7	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	153.38%	120.00%
8	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	105.26%	105.26%
9	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0.00%	120.00%
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70%	95.19%	120.00%
11	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90.0%	100.00%	111.11%
12	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	116.94%	116.94%
13	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	95.17%	110.66%
14	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	100%	132.79%	120.00%
15	Indeks Kinerja Kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120.00%	120.00%
16	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	120%	120.00%
17	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	0,00%	120.00%
18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	85.51	120.00%
19	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120.00%	120.00%
20	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	97.02	120.00%

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah **115.83**. Nilai NKO ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 dari 114,69

menjadi 115.83, hal ini menunjukkan komitmen dari seluruh insan di Kanwil DJKN untuk mendukung pencapaian target dengan tantangan.

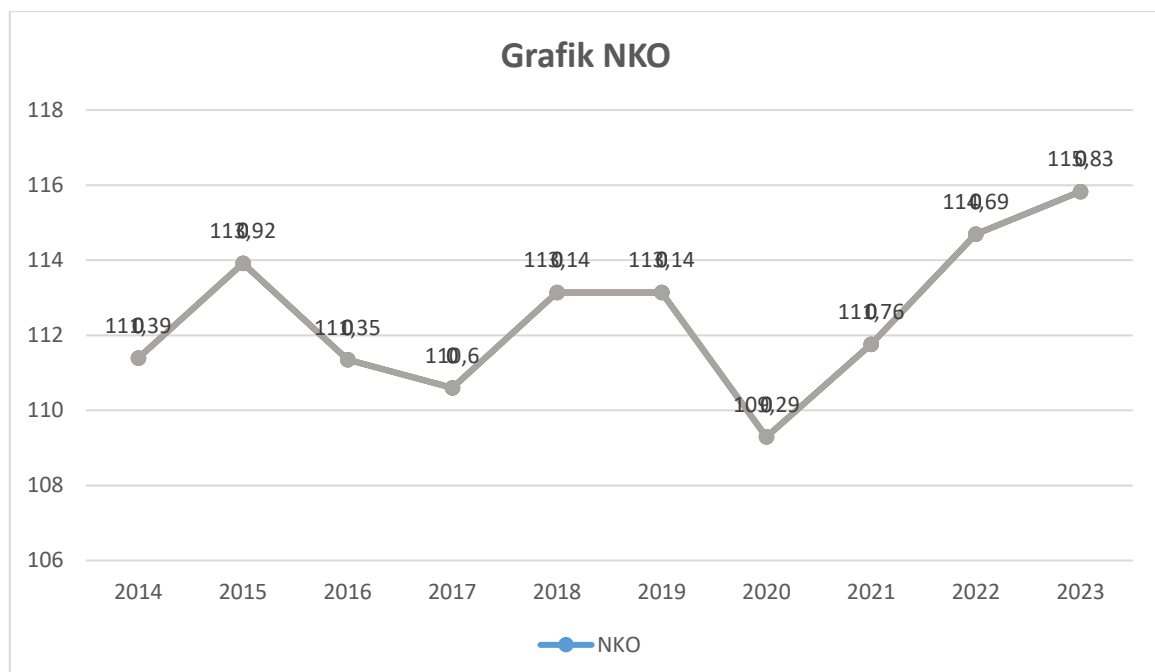
Rincian capaian dari masing-masing IKU sebagaimana data terlampir. Berikut adalah tabel data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat antara tahun 2013 sampai dengan 2023.

Tabel 3.3 Nilai NKO pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2013 sampai dengan 2023

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah IKU	17	18	16	21	18	16	20	19	20	20
NKO	111,39	113,92	111,35	110,60	113,14	113,14	109,29	111,76	114,69	115,83

Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Kalimantan Barat dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:

Tabel 3.4 Perkembangan NKO pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2013 sampai dengan 2023



A.1 Analisis Capaian

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2023, diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2023, sebagai berikut:

a. IKU 1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Target IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang di Tahun 2023 (Adendum III) adalah sebesar Rp38.034.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp43.782.653.408,00 dimana capaian IKU sebesar 115,11%.

Adapun IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Realisasi PNBPN dari BMN

Target PNBPN dari BMN tahun 2023 sebesar Rp28.400.000.000,00 realisasi sebesar Rp 32.827.636.740,00 dengan capaian 115,59%

2. Realisasi PNBPN dari Piutang Negara

Target PNBPN dari Piutang Negara tahun 2023 sebesar Rp33.600.000,00 realisasi sebesar Rp75.894.589,00 dengan capaian 225,88%

3. Realisasi PNBPN dari Lelang

Target PNBPN dari lelang tahun 2023 sebesar Rp9.601.000.000,00 dengan realisasi Rp10.879.122.079,00 dengan capaian 113,31%.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengamankan tercapainya target tahun 2023 yaitu:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Satuan Kerja untuk melakukan lelang BMN yang telah disetujui penghapusannya;
2. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri untuk melakukan lelang barang rampasan.
3. Pembinaan kepada Satuan Kerja melalui surat untuk melaksanakan penjualan BMN dalam kondisi RB melalui lelang.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

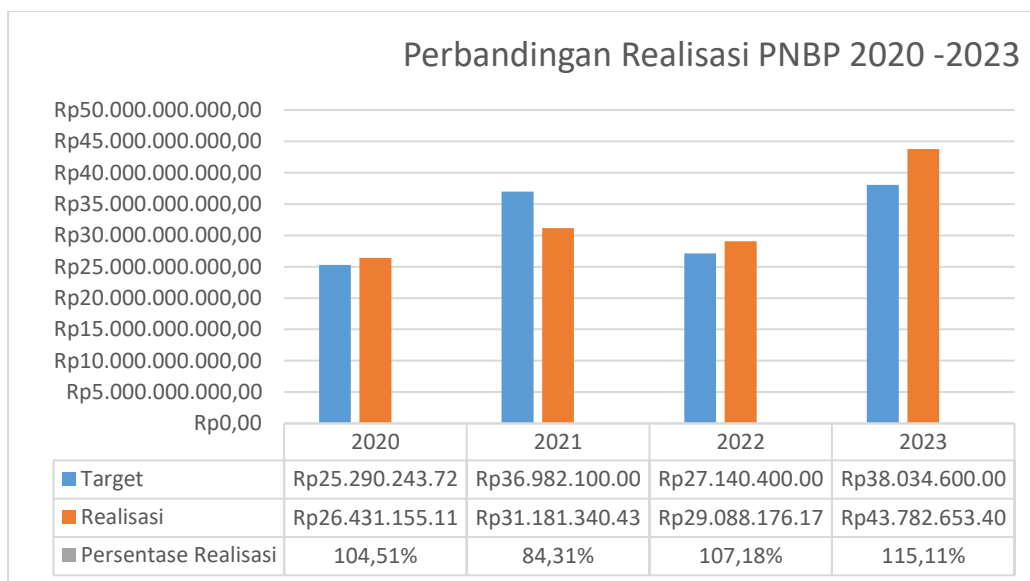
Kode IKU	URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
a.	Target/Realisasi PNPB BMN	Rp 28.400.000.000	Rp 32.827.636.740	Rp 32.827.636.740	Rp 32.827.636.740
	KPKNL Pontianak	Rp 24.800.000.000	Rp 29.632.473.524	Rp 29.632.473.524	Rp 29.632.473.524
	KPKNL Singkawang	Rp 3.600.000.000	Rp 3.195.163.216	Rp 3.195.163.216	Rp 3.195.163.216
b.	Target/Realisasi PNPB Piutang Negara	Rp 33.600.000	Rp 75.894.589	Rp 75.894.589	Rp 75.894.589
	KPKNL Pontianak	Rp 32.000.000	Rp 69.364.041	Rp 69.364.041	Rp 69.364.041
	KPKNL Singkawang	Rp 1.600.000	Rp 6.530.548	Rp 6.530.548	Rp 6.530.548
c.	Target/Realisasi PNPB Lelang	Rp 9.601.000.000	Rp 10.879.122.079	Rp 10.879.122.079	Rp 10.879.122.079
	Kanwil DJKN Kalimantan Barat	Rp 288.000.000	Rp 525.159.690	Rp 525.159.690	Rp 525.159.690
	KPKNL Pontianak	Rp 6.361.000.000	Rp 7.942.528.997	Rp 7.942.528.997	Rp 7.942.528.997
	KPKNL Singkawang	Rp 2.952.000.000	Rp 2.411.433.392	Rp 2.411.433.392	Rp 2.411.433.392
TOTAL	Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp 38.034.600.000	Rp 43.782.653.408	Rp 43.782.653.408	Rp 43.782.653.408
	Kanwil DJKN Kalimantan Barat	Rp 288.000.000	Rp 525.159.690	Rp 525.159.690	Rp 525.159.690
	KPKNL Pontianak	Rp 31.193.000.000	Rp 37.644.366.562	Rp 37.644.366.562	Rp 37.644.366.562
	KPKNL Singkawang	Rp 6.553.600.000	Rp 5.613.127.156	Rp 5.613.127.156	Rp 5.613.127.156

Perbandingan pencapaian target dan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 secara presentase mengalami pertumbuhan positif. IKU pengelolaan kekayaan negara ini dalam proses pelaksanaan masih terdapat kendala-kendala, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman dari satuan kerja atas peraturan barang milik negara (BMN) terkait, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN; dan
2. Satuan Kerja melaksanakan pemanfaatan tanpa persetujuan Pengelola Barang.

Mengingat IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai keterkaitan yang erat dengan aktivitas kantor pelayanan (KPKNL), Kanwil terus melakukan pemantauan, bimbingan/asistensi dan mitigasi secara berkesinambungan guna memastikan tercapainya capaian kinerja yang telah ditentukan, telah dilakukan beberapa hal, antara lain:

1. Melaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan aset;
2. Bimbingan asistensi dan penggalan potensi lelang ke KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang;
3. Melakukan monev secara berkala KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang;



b. IKU 1b-CP Persentase produktivitas lelang

Dalam rangka mengukur ketercapaian sasaran strategi ini, digunakan indikator persentase produktivitas hasil lelang yang diperoleh dari realisasi jumlah frekuensi lelang laku secara keseluruhan serta frekuensi lelang laku secara keseluruhan baik lelang sukarela atau perorangan.

Target produktivitas lelang sebesar 80% untuk tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 139,12%. Terlampauinya target produktivitas lelang menjadi indikasi dinamika perekonomian di wilayah Kalimantan Barat yang mengalami pemulihan ekonomi dampak pandemik. Jaringan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak *stakeholder* yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja. *Focus Group Discussion* (FGD) dan intensitas penyebaran informasi tentang meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait pelayanan Lelang.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
1b-CP	P/M	Persentase produktivitas lelang				
a		Persentase ProduktivitasTotal Lot laku Lelang		42%	42%	42%
		KPKNL Pontianak		42%	42%	42%
		KPKNL Singkawang		42%	42%	42%
		Jumlah Frekuensi lelang	1168	1349	1349	1349
		KPKNL Pontianak	949	1049	1049	1049
		KPKNL Singkawang	219	300	300	300
		% Frekuensi Lelang			69,30%	69,30%
Capaian IKU					111,30%	111,30%

c. IKU 1c-CP Indeks Integritas

Target Indeks Integritas pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat sebesar 88.67 dengan realisasi sebesar 89.17, dengan demikian capaian IKU Tingkat Keberhasilan Indeks Integritas di tahun 2023 sebesar 100.56% dari target yang ditetapkan.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kemenkeu.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
1c-CP	P/L	Indeks Integritas				
		Indeks Integritas	88,67	89,17		89,17

d. IKU 2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Kanwil DJKN Kalimantan Barat terkait pelayanan lelang memiliki fungsi pengawasan dan fungsi koordinasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan lelang yang potensial. Peningkatan pelaksanaan lelang yang potensial dilakukan melalui penggalian potensi lelang, koordinasi masif dengan stakeholder di tingkat regional, peningkatan pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang yang aktif melaksanakan lelang di wilayah Kalimantan Barat.

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang

dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi Pokok Lelang yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian Pokok Lelang tahun 2023 sebesar Rp428.775.083.912,00 dari target sebesar Rp341.600.000.000,00 atau capaian sebesar 125,52%.

Penambahan informasi pelaksanaan lelang dengan menggunakan berbagai saluran informasi yang masif dan memiliki jangkauan yang kuat dan berpengaruh diupayakan untuk dimanfaatkan.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
2a-CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp 341.600.000.000	Rp 428.775.083.912	Rp 428.775.083.912	Rp 428.775.083.912
		Kanwil DJKN Kalimantan Barat	Rp 48.600.000.000	Rp 87.506.615.000	Rp 87.506.615.000	Rp 87.506.615.000
		KPKNL Pontianak	Rp 205.000.000.000	Rp 264.416.775.964	Rp 264.416.775.964	Rp 264.416.775.964
		KPKNL Singkawang	Rp 88.000.000.000	Rp 76.851.692.948	Rp 76.851.692.948	Rp 76.851.692.948

e. IKU 2b-CP Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

Tingkat penurunan outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan Piutang Negara dan penagihan yang telah dilakukan. Penurunan *outstanding* Piutang Negara yang SP3N diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp Rp1.673.237.000,00. Capaian penurunan nilai *outstanding* Piutang Negara pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat memperoleh hasil sebesar Rp3.943.040.901,00 atau capaian sebesar 235,65%.

Keberhasilan pencapaian ini didukung dengan upaya-upaya antara lain efektifitas pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait antara lain Penyerah Piutang BKN dan lain-lain, intensifikasi penagihan dan melakukan optimalisasi pengurusan Piutang Negara, monitoring dan evaluasi yang terprogram dengan baik dan berkelanjutan terhadap kinerja KPKNL. Tentunya pandemi covid sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan upaya penagihan kepada Debitur.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
2b-CP	P/M	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	MAX/TLK			
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp 1.673.237.000	Rp 3.943.040.901	Rp 3.943.040.901	Rp 3.943.040.901
		KPKNL Pontianak	Rp 1.300.400.000	Rp 2.418.320.700	Rp 2.418.320.700	Rp 2.418.320.700
		KPKNL Singkawang	Rp 372.837.000	Rp 1.524.720.201	Rp 1.524.720.201	Rp 1.524.720.201

Kanwil DJKN Kalimantan Barat selaku Pembina maupun *superintendent* mengambil beberapa langkah diantaranya seperti melakukan monitoring dan evaluasi berkala (per bulan) secara virtual melalui Aplikasi Teams/Zoom, melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang ke stakholder/ pemohon lelang, mendorong KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II untuk menggiatkan Lelang Noneksekusi Sukarela khususnya produk-produk UMKM sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat umum tentang keunggulan membeli barang melalui Lelang.

f. IKU 3a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan

Capaian IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK di Tahun 2023 sebesar 77,03% dari target sebesar 68%, sehingga capaian IKU dengan indeks tanpa batas sebesar 113,28% atau dengan indeks maks 113,28%. Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari kerja keras, koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Negara pada Kanwil DJKN Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan juga Kepala KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang serta Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang dengan satuan kerja terkait.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Bentuk Optimalisasi Pengelolaan BMN sesuai PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 Tahun 2020:

1. Penggunaan BMN

2. Pemanfaatan BMN
3. Optimalisasi lainnya sesuai PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 tahun 2020, antara lain: penyerahan ke pengelola sebagai BMN Idle, Rehabilitasi untuk BMN Rusak Berat (RB), dan Penghapusan.

Pembobotan dilakukan dengan rincian yaitu:

- a. Hasil Pengukuran Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan (75%)
- b. Hasil Optimalisasi NUP/Objek BMN Pelaksanaan sebelumnya (25%)

Adapun yang menjadi Objek Target BMN yaitu Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor, Tanah dan/atau Rumah Negara/Mess/Asrama/Sejenisnya, Tanah dan/atau bangunan Pendidikan/Tahanan/Persidangan pada satker Kementerian/Lembaga Target Tahun berjalan dan Carry Over NUP/Objek BMN Target pada pelaksanaan sebelumnya yang belum selesai.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
3a-CP	P/M	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan	MAX/TLK			
		Target tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%			
		KPKNL Pontianak	68%	74,07%	74,07%	74,07%
		KPKNL Singkawang	68%	83,25%	83,25%	83,25%

g. IKU 3b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Pada Tahun 2023, Kanwil DJKN Kalbar bersama dengan Kanwil BPN Kalbar telah menyelesaikan sertifikasi 559 bidang tanah sehingga capaian IKU dengan indeks tanpa batas sebesar 153,38%. Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh Bidang PKN Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, seluruh Kantor Pertanahan di wilayah Kalimantan Barat, KPKNL Pontianak, KPKNL Singkawang serta satuan kerja target sertifikasi.

Hal-hal yang mendukung capaian sertifikasi BMN antara lain:

1. Peraturan Bersama antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dengan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24/PMK.06/2009 tentang Pensertifikatan BMN berupa tanah dimana tindak lanjut dari Peraturan Bersama tersebut adalah kedua belah pihak membuat Berita Acara Kesepahaman Kerjasama Percepatan Pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah, masing-masing pihak baik DJKN maupun BPN mempunyai target yang harus dicapai;

2. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman satker target terhadap prosedur pensertifikatan BMN berupa tanah;
3. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan monitoring secara intensif sehingga penyelesaian permasalahan dapat dilakukan dengan cepat;
4. Pihak BPN dan unit kantor layanan yang sangat responsif dan solutif terhadap permohonan sertifikasi BMN.

Meskipun demikian, terdapat kendala yang dihadapi dalam sertifikasi BMN, antara lain:

1. Masih terdapat bidang tanah yang belum dilakukan pengukuran;
2. Masih terdapat kekurangan berkas yang belum disampaikan Satker ke Kantor Pertanahan;
3. Terdapat berkas permohonan yang belum disampaikan ke Kantor Pertanahan atas bidang tanah yang mengalami pemecahan;
4. Kepala Desa tidak berkenan menghadiri pengukuran dan menandatangani dokumen kelengkapan atas beberapa bidang tanah;
5. Telah terbit SHM/SHP atas bidang-bidang tanah yang menjadi target;
6. Tidak adanya Sertipikat Asli sebagai dokumen yang dibutuhkan dalam penyelesaian BBSK di beberapa Satker.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Progress Pelaksanaan Program Percepatan
2. Pensertipikatan BMN Berupa Tanah 2023 secara berkala baik tingkat Satker maupun KPKNL;
3. Koordinasi dengan Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan dengan kunjungan ke lapangan dan virtual;
4. Melakukan identifikasi bidang-bidang tanah sebagai pengganti target bidang tanah yang tidak dapat dilanjutkan pensertipikatannya;
5. Koordinasi intensif dengan Satuan Kerja, Kanwil BPN Kalimantan Barat, dan Kantor Pertanahan.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
3b-CP	P/L	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	MAX/TLK	559	559	559
		KPKNL Pontianak	681	340	340	340
		KPKNL Singkawang	269	219	219	219
		Jumlah target/realisasi bidang tanah yang telah disertipikatkan	950			

h. IKU 3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

IKU ini menggambarkan efektifitas pengurusan Piutang Negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas BKPN yang telah lama ditangani oleh PUPN. Penyelesaian dilakukan

BKPN lunas, penarikan, dikembalikan, dan PSBDT. Target Kanwil DJKN Kalimantan Barat sebesar 114 BKPN. Capaian pada tahun 2023 sebesar 120 BKPN atau sebesar 105,26%.

Koordinasi dan sinergi antara Kanwil DJKN Kalimantan Barat, KPKNL Pontianak, KPKNL Singkawang dan Penyerah Piutang sangat berdampak pada capaian efektifitas penyelesaian BKPN. Kendala yang dihadapi dalam pengurusan Piutang Negara antara lain:

1. Potensi dan kualitas piutang yang rendah karena merupakan piutang lama dan tidak didukung barang jaminan.
2. Wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang sangat luas (14 kabupaten/kota) yang hanya dilayani oleh 2 KPKNL.
3. Debitor sudah tidak diketahui keberadaannya dan alamat tempat usaha sudah tidak aktif lagi khususnya debitor penyerahan dari Kementerian Kehutanan dimana tempat usaha.
4. Keterbatasan untuk mendapatkan profil perusahaan Debitor, sehingga membutuhkan koordinasi dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham.

Lebih lanjut, upaya-upaya yang telah dilakukan:

1. Memetakan alamat debitor dan Melaksanakan penagihan langsung ke lapangan;
2. Meningkatkan tahap pengurusan terhadap beberapa debitor;
3. meningkatkan tahap pengurusan terhadap debitor (Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, SPPBS);
4. melaksanakan panggilan penyelesaian piutang terhadap seluruh debitor.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
		Capaian IKU	-		110,26%	153,38%
3c-CP	P/M	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	MAX/TLK	120	120	120
		KPKNL Pontianak	18	23	23	23
		KPKNL Singkawang	96	97	97	97
		Target/Realisasi Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	114		120	120

i. IKU 4a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Kanwil DJKN Kalimantan Barat memiliki target IKU ini yaitu sebesar 25% dengan realisasi sebesar 0%, dengan demikian capaian IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian di tahun 2023 sebesar 200% dari target yang ditetapkan. IKU ini digunakan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian.

Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari kerja keras dan sinergi yang dilakukan oleh Bidang Penilaian pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat, seksi Penilaian pada KPKNL

Pontianak dan KPKNL Singkawang dengan Bidang PKN/Direktorat PKN, dan seksi PKN pada KPKNL.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Dari hasil evaluasi tersebut maka diketahui apakah dari sisi kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial kelayakan finansial dan kondisi teknis gedung/bangunan tersebut layak dipertahankan sesuai fungsinya saat ini.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
4a-CP	P/M	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN/TLK			
		Kanwil DJKN Kalimantan Barat	25%	0,00%	0,00%	0,00%
		KPKNL Pontianak	25%	0,00%	0,00%	0,00%
		KPKNL Singkawang	25%	0,00%	0,00%	0,00%
		Target/realisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%		0,00%	0,00%

j. 4b-N Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Kanwil DJKN Kalimantan Barat memiliki target IKU ini yaitu sebesar 70% dengan realisasi sebesar 95,19%. Penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat

dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian yaitu Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

- Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon.
- Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
- Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survey lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD).

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
4b-N	P/M	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	Max/AVG			
		Kanwil DJKN Kalimantan Barat	70%	95,19%	95,19%	95,19%

k. 5a-N Persentase Pelaksanaan Lelang Online

Pelaksanaan *e-auction*, dalam rangka mendorong optimalisasi www.lelang.go.id, KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang berkomitmen untuk melaksanakan lelang



secara online, sehingga capaian e auction tahun 2023 sebesar 100%. Pelaksanaan lelang secara online sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di tengah pandemi. Masyarakat dapat mengikuti lelang dari mana saja dan terjadi persaingan sempurna untuk mendapatkan hasil yang optimal.

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL dengan memanfaatkan teknologi internet. Pemanfaatan teknologi internet dalam pelaksanaan lelang ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. *E-auction* dapat menjaring peserta dari seluruh pelosok (peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang) dan dapat meminimalkan intervensi antar peserta lelang, maupun antara KPKNL dengan peserta lelang. Persentase capaian target Implementasi *e-auction*:

- a. Dari capaian IKU diatas dapat kita analisis, hal-hal yang mendukung tercapai target implementasi e-auction antara lain Aplikasi lelang online sudah user *friendly* dan mudah diakses dimana saja sepanjang ada jaringan internet serta E-auction terbukti sebagai mekanisme lelang yang dapat memberikan peningkatan harga yang signifikan. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian terget dimaksud antara lain.
- b. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur lelang secara online. Terkait dengan sarana dan prasarana yang ada khususnya di KPKNL, pelaksanaan e-Auction membutuhkan dukungan daya listrik dan jaringan internet yang stabil tentunya perlu penambahan sarana seperti Genset dan juga jaringan internet di luar VPN dari Pusintek.
- c. Terkait dengan sarana dan prasarana yang ada khususnya di KPKNL, pelaksanaan e-Auction membutuhkan dukungan daya listrik dan jaringan internet yang stabil tentunya perlu penambahan sarana seperti Genset dan juga jaringan internet di luar VPN dari Pusintek.
- d. Terkait sumber daya manusia, khususnya jumlah Pejabat Lelang Kelas I perlu penambahan kuantitas dan juga peningkatan kualitas terkait kompetensi dibidang IT untuk mendukung pelaksanaan *e-auction*.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dengan pencapaian IKU persentase implementasi *e-auction* diantara kegiatan sosialisasi kepada stakeholer lelang untuk mengenalkan lelang menggunakan tata cara penawaran melalui *e-auction*, pembentukan e-Auction Corner di KPKNL, pemantauan pelaksanaan *e-auction* yang rutin oleh Kanwil dan menyarankan kepada KPKNL agar sarana e-auction disiapkan pegawai yang mampu membimbing peserta lelang yang berminat mengikuti lelang *e-auction*, penetapan *e-auction* sebagai salah satu layanan unggulan Kementerian Keuangan yang didukung oleh semua pelaksana kebijakan lelang melalui e-auction.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
5a1-N	P/M	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	MAX/TLK			
		Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction	280	1.324	1.324	1.324
		KPKNL Pontianak	227	1.049	1.049	1.049
		KPKNL Singkawang	53	275	275	275
		Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction		0	0	0
		KPKNL Pontianak		0	0	0
		KPKNL Singkawang		0	0	0
		Capaian realisasi e-Auction		100,00%	100,00%	100,00%
		Capaian Realisasi e-Conventional Auction		0,00%	0,00%	0,00%
		Jumlah Target/Realisasi pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction		100%	100,00%	100,00%

I. 5b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) di Tahun 2023 sebesar 116,94% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU dengan indeks tanpa batas sebesar 116,94%. Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari kerja keras, koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Negara pada Kanwil DJKN Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan juga Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang dengan satuan kerja terkait.

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Formula untuk menghitung implementasi evaluasi kinerja BMN adalah jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dibagi dengan jumlah target aset yang akan dievaluasi dikalikan 100%. Tujuannya adalah terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
5b-N	P/H	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	MAX/TLK			
		Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya	87			
		KPKNL Pontianak	51	55	55	55
		KPKNL Singkawang	36	44	44	44
		Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti satker	18	99	99	99
		KPKNL Pontianak	5	5	5	5
		KPKNL Singkawang	13	14	14	14
		Jumlah Aset/Jumlah Target Aset	87	19	19	19
		Jumlah Rekomendasi/Jumlah Target Rekomendasi	18			
		TOTAL	105	118	118	118



m. 6a-N Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset, dengan Target IKU sebesar 86%, adapun capaian pada Tahun 2023 sebesar 95,17% atau 110,66%. Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh Bidang PKN Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan KPKNL Pontianak, KPKNL Singkawang serta satuan kerja di wilayah Kalimantan Barat.

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah Sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; Pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; Penatausahaan; dan pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
6a-N	P/L	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	MAX/TLK			
		Pembinaan Pengelolaan BMN				95%
a		Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN		106	106	106
		Kanwil DJKN Kalimantan Barat		2	2	2
		KPKNL Pontianak		78	78	78
		KPKNL Singkawang		26	26	26
		Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN		78	78	78
		Kanwil DJKN Kalimantan Barat		1	1	1
		KPKNL Pontianak		59	46	46
		KPKNL Singkawang		18	18	18

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
b		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II		112	112	112
		Kanwil DJKN Kalimantan Barat		2	2	2
		KPKNL Pontianak		84	84	84
		KPKNL Singkawang		26	26	26
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023		81	81	81
		Kanwil DJKN Kalimantan Barat		1	1	1
		KPKNL Pontianak		62	62	62
		KPKNL Singkawang		18	18	18
		Target/Realisasi Jumlah tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara			95,34%	95,34%

n. 7a-N Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu

Target IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu sebesar 132,79% dari target sebesar 100%. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penompang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu terdiri dari Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan dan Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah. Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur pengukuran, yaitu: (i) Partisipasi Agenda Setting dan (ii) *Employee Advocacy*. Sedangkan Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah pengukuran IKU akan difokuskan kepada implementasi kegiatan yang ada di seker wilayah, yaitu: (i) Join program penerimaan (30%), (ii) RCE (35%) 3. Sinergi UMKM (35%). IKU ini akan diterapkan mandatory bagi seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di lingkungan Kemenkeu.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
7a-N	P/M	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu				
7a1-CP	P/M	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	Max/AVG			
		Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55)	4,87	4,50	5,05
		Capaian Sub IKU		4,87	4,50	5,05
7a2-N	P/M	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	Max/AVG			
		Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100	123,33%	123,33%	123,33%
		Capaian Sub IKU				123,33%
		Capaian IKU				132,79%

o. 8a-CP Indeks Kinerja Kualitas pelaksanaan anggaran

Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan. IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atas capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, penyerapan anggaran atas pagu netto, penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, penyampaian LPJ, pengembalian SPM, retur DIPA, pagu minus dan dispensasi SPM.

Evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai SE-32/MK.1/2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator kinerja utama penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja di lingkungan Kementerian Keuangan. Unsur pengukuran IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran terdiri dari komponen hasil dan komponen proses. Pengukuran IKPA meliputi aspek:

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran;
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran;
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran; dan
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran.

Pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran.

Pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran.

Pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran.

Pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA.

Pada tahun 2023 ditetapkan target IKU sebesar 100,00% dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat memperoleh capaian sebesar 120,00%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
8a-CP	P/M	Indeks Kinerja Kualitas pelaksanaan anggaran	Max/TLK			
		Indeks Kinerja Kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120,00%	120,00%	120,00%
		Target kualitas pelaksanaan anggaran	100%			
		Capaian IKU	-		120,00%	120,00%

p. 8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan target IKU sebesar 100% capaian sebesar 120%. Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
8b-N	P/M	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Max/AVG			
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	120%	120%	120%

q. 8c-N Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Kanwil DJKN Kalimantan Barat memiliki target IKU ini yaitu sebesar 15% dengan realisasi sebesar 0%, dengan demikian capaian IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian di tahun 2023 sebesar 200% dari target yang ditetapkan.

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425783 (PL II) dan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

1. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;
2. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425783, 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
8c-N	P/M	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	MIN/TLK			
		Kanwil DJKN Kalimantan Barat	15%	0,00%	0,00%	0,00%
		KPKNL Pontianak	15%	0,00%	0,00%	0,00%
		KPKNL Singkawang	15%	0,00%	0,00%	0,00%
		Target/Realisasi Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%		0,00%	0,00%

r. 9b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

Kanwil DJKN Kalimantan Barat memiliki target IKU ini yaitu sebesar 60 dengan realisasi sebesar 85,51 dengan indeks tanpa batas 142,52%, dengan demikian capaian IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif di tahun 2023 sebesar 120% dari target yang ditetapkan.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
9b-N	P/M	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	Max/AVG			
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif		85,51		85,51

s. 10a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Definisi IKU Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Tujuan adanya IKU ini adalah untuk mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan penyelenggara.

Pada tahun 2023, persentase pengembangan pegawai mencapai 120% dan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal yang mendukung pencapaian

target ini antara lain banyaknya pelaksanaan diklat yang ditawarkan oleh Kantor Pusat DJKN dan adanya aplikasi diklat yang memudahkan pegawai dalam menentukan diklat yang akan diikutinya.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
10a-N	P/M	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX/TLK			
		Satker Kanwil				
a		Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria		40	40	40
				40	40	40
b		Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria		40	40	40
				40	40	40
c		Jumlah bawahan total		40	40	40
				40	40	40
		% Capaian Utama			100,00%	100,00%
		% Capaian Tambahan			100,00%	100,00%

t. 10b-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Target IKU review pengelolaan kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko Tahun 2023 berbasis BSC sebesar 80 dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat memperoleh nilai sebesar 97,02 atau sebesar 121,28%. IKU ini untuk mengetahui perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di Kanwil DJKN Kalimantan Barat serta sebagai upaya memberikan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa yang akan datang. Terdapat 4 komponen dalam pengelolaan kinerja yaitu :

- ✓ Perencanaan Kinerja
- ✓ Pelaksanaan/eksekusi kinerja
- ✓ Monitoring dan evaluasi kinerja
- ✓ Intensitas edukasi kinerja

Dengan hasil penilaian sebesar 97,02 menggambarkan pengelolaan kinerja pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat telah dilakukan dengan sangat baik. Namun demikian, di masa yang akan datang akan terus dikembangkan sehingga kualitas pengelolaan kinerja dapat lebih.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU		URAIAN	Target 2023 (Adendum TW 3)	Capaian Desember	Capaian Q4	Capaian sd. Q4 (Tahun 2023)
10b-N	P/M	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	MAX/TLK			
		Nilai Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko		97,02		

B. REALISASI ANGGARAN

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, realisasi anggaran belanja Kanwil DJKN Kalimantan Barat mencapai **90,87%**. Kanwil DJKN Kalimantan Barat senantiasa mengelola anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran belanja TA 2023 tersaji dalam tabel berikut ini:

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)		REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
	AWAL	AKHIR			
BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-	-
BELANJA BARANG	2,418,278,000	2,418,278,000	2,127,193,166	87.96%	291,084,834
BELANJA MODAL	889,749,000	889,749,000	878,700,000	98.76%	11,049,000
JUMLAH	3,308,027,000	3,308,027,000	3,005,893,166	90.87%	302,133,834

C. ACHIEVEMENT KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

C.1 Juara 1 Optimalisasi Aset Pada Pengguna Barang (Koin Mas 22/23)

Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk menjadi *a distinguished asset manager* dengan model manajemen aset yang Kontributif, Otoritatif, Instrumental, Mutakhir, Adaptif, dan Sustainable serta memiliki kemampuan perencanaan, manajerial, komunikasi, dokumentasi, dan publikasi yang baik, DJKN menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN. Dalam kompetisi tersebut Kanwil DJKN Kalimantan Barat meraih Juara 1 dengan kategori Kompetisi Optimalisasi BMN pada Pengguna Barang.



C.2 Capaian Nilai IKPA Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2022 (Kategori Pagu 500jt s.d. 2,5M)

Kanwil DJKN Kalimantan Barat berhasil memaksimalkan pengelolaan anggaran sehingga segala program kerja dan target kinerja dapat tercapai sesuai dengan rancangan anggaran. Kantor Wilayah DJPb memberikan penghargaan atas capaian tersebut dengan kategori Capaian Nilai IKPA Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2022 (Kategori Pagu 500jt s.d. 2,5M).

C.3 Kerjasama dan dukungan dalam pelaksanaan penilaian barang milik daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Penghargaan ini diberikan oleh Gubernur Kalimantan Barat atas Kerjasama dan dukungan yang diberikan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat dalam Pelaksanaan Penilaian dan Lelang Barang Milk Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



C.4 Peringkat Pertama Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat Wilayah Kategori UAPPA-W Kemenkeu Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan barat TA 2022



C.5 Penghargaan atas Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 118,56 periode Semester I 2023 dengan Predikat Istimewa

Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan penghargaan kepada Kantor Wilayah maupun KPKNL yang terbagi menjadi beberapa kategori. Pada kategori tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Barat berhasil meraih penghargaan atas Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 118,56 periode Semester I 2023 dengan Predikat Istimewa.



C.6. Penghargaan atas Peran Serta dan Kontribusi dalam Menunjang Pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak



C.7 Piagam Penghargaan sebagai Juara II Lomba Video Reel Internal Kemenkeu Tingkat Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat



C.8 Piagam Penghargaan sebagai Juara III Lomba Foto Ajang Kreativitas Insan Lelang Tahun 2023



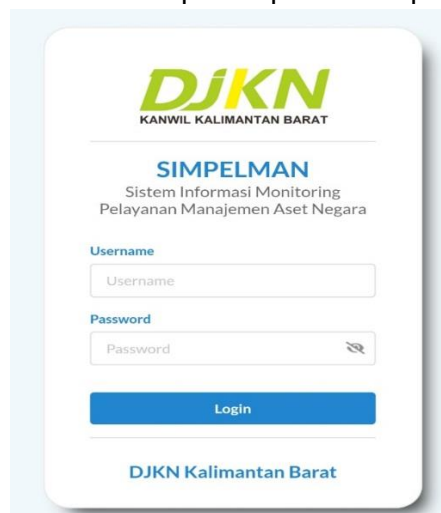
D. INOVASI DAN KEBERLANJUTANNYA

D.1 Keberlanjutan Pengembangan Aplikasi

Kanwil DJKN Kalimantan Barat bekerja sama dengan Fakultas Teknis Universitas Tanjungpura telah mengembangkan aplikasi SIMPELMAN dalam rangka mendukung kualitas layanan yaitu:

- a. Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pelayanan Manajemen Aset Negara (SIMPELMAN)

Gambar 3.7 Tampilan Aplikasi Simpelman



Aplikasi yang dibangun untuk memonitoring pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat, KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang dan *stakeholders* dapat ikut memantau proses penyelesaian permohonan tersebut, serta dapat diajukan secara online oleh *stakeholders* dan produk layanan dapat diterima secara digital oleh *stakeholders* melalui email. Tujuan pengembangan aplikasi:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 2) Menghilangkan KKN dalam pelayanan;

- 
- 3) Meningkatkan percepatan layanan;
 - 4) Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pengajuan layanan;
 - 5) Meningkatkan pengendalian internal atas layanan melalui monitoring progress layanan oleh pimpinan DJKN Kalbar maupun *stakeholders*;
 - 6) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan.

Aplikasi SIMPELMAN sampai saat ini terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, antara lain telah diusulkan kepada Sekretariat DJKN, Direktorat TSI dan Direktorat Lelang untuk dapat diintegrasikan dengan lelang.go.id

- b. Google Callender
Aplikasi terkait jadwal kerja seluruh bidang pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat.
- c. *Spreadsheets Weekly Meeting*
Aplikasi ini merupakan salah satu tools/alat yang memuat laporan rencana kegiatan dan tindak lanjut hasil *weekly meeting* periode sebelumnya, sehingga setiap rencana kerja dapat dilakukan monitoring secara berkala.
- d. Aplikasi E-APT
Aplikasi ini merupakan pengisian buku tamu secara digital dan pemberian kuesioner secara digital.

D.2 Penyusunan Standar Operating Procedure Tentang Integrasi Proses Bisnis Layanan Pengelolaan BMN Dan Penilaian Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat

Kanwil DJKN Kalimantan Barat Menyusun SOP tersebut sebagai upaya meningkatkan pemberian pelayanan yang terbaik bagi *stakeholder* dengan memberikan kejelasan waktu penyelesaian.

D.3 Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tentang Penyelesaian Benda Sitaan, Barang Rampasan, dan Benda Sita Eksekusi serta Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berada di wilayah Kalimantan Barat

Tujuan dilakukan Perjanjian Kerjasama adalah optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam rangka penyelesaian benda sitaan, barang rampasan dan benda sita eksekusi serta penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memiliki peranan penting dalam pengelolaan aset tersebut sehingga perjanjian kerjasama ini akan lebih meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam pengelolaan aset serta mendukung setiap upaya pemerintah guna mewujudkan Indonesia maju.

D.4 Percepatan Standar Operating Procedure (SOP)

Kanwil DJKN Kalimantan Barat melakukan percepatan pelayanan kepada stakeholder dan layanan baru berupa :

- 
- ✓ Penambahan SOP Pemberian Asistensi KSP kepada KPKNL (5 hari kerja menjadi 4 hari kerja)
 - ✓ Pemberian Tanggapan Permohonan Informasi kepada Bidang PKN
 - ✓ Percepatan Pemberian Bimbingan Teknis Bidang Lelang (7 hari kerja menjadi 3 hari kerja)
 - ✓ Percepatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Langsung (40 hari kerja menjadi 12 hari kerja)
 - ✓ Percepatan Permohonan Keringanan Hutang (10 hari kerja menjadi 5 hari kerja)

D.5 Pelayanan Proaktif

Kanwil DJKN Kalimantan Barat secara proaktif melakukan pelayanan antara lain terkait Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, penyelesaian pemanfaatan BMN pada Satuan Kerja, Penyelesaian aset eks PT. PPA dan BDL, penyelesaian target sertifikasi BMN.

D.6 Publikasi

Publikasi senantiasa dilakukan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat melalui media sosial, website, media massa lokal Pontianak Post, acara Bincang di TVRI Stasiun Kalimantan Barat, RRI dan aktif menyampaikan opini yang diterbitkan melalui website DJKN dan harian Pontianak Post.

D.7 Buku Profil Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Disusunnya buku profil Kanwil DJKN Kalimantan Barat ditujukan untuk menjadi panduan bagi *stakeholders* agar lebih mengenal Kanwil DJKN Kalimantan Barat baik mengenai layanan yang diberikan serta jangka waktu penyelesaian sesuai SOP, tugas dan fungsinya, struktur organisasi, wilayah kerja, dan pejabat dan pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kanwil Wilayah DJKN Kalimantan Barat serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024.

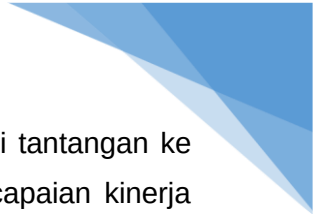
Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu alat/*tools* dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja sasaran didasari atas penilaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada awal tahun 2023 telah ditetapkan 12 Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan dalam 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut dituangkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2023 yang juga merupakan turunan dari IKU Kemenkeu *One*.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas sebagai Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang menghadapi tantangan di tahun 2023 dan hasil kinerja tahun 2023 tercermin dalam capaian Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat tahun 2023 sebesar 115,83%.

Kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif di tengah wabah pandemi Covid-19, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, Piutang Negara, dan Lelang harus dijawab dengan inovasi, perbaikan proses bisnis dan peningkatan pelayanan. Namun demikian, seluruh insan pegawai Kanwil DJKN Kalimantan senantiasa berusaha menjadikan setiap kendala atau tantangan menjadi peluang dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat pada tahun 2023 secara umum dapat dikatakan baik dan dari target 20 IKU terdapat 20 IKU hijau.

Strategi Pengamanan Pencapaian Target Tahun 2023

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kanwil DJKN Kalimantan Barat menghadapi perubahan lingkungan organisasi seiring dengan perkembangan teknologi yang berpengaruh ke proses bisnis dan meningkatnya tuntutan masyarakat atas tata kelola pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang yang baik.



Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah dalam menghadapi tantangan ke depan sebagaimana dalam rangka mencapai rencana kerja dan target capaian kinerja Tahun 2023:

- 1) Guna mencapai target IKU Tahun 2023, perlu disusun strategi dan mitigasi risiko pencapaian target.
- 2) Terkait pencapaian IKU;
 - a. Target PNBPN Pengelolaan BMN dan penyelesaian Piutang Negara Tahun 2023, perlu direncanakan secara strategis agar target dapat terealisasi;
 - b. Penyelesaian sertipikasi Tahun 2023 dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi lebih awal antara satuan kerja pemilik tanah BMN dengan Kantor Pertanahan setempat.
 - c. Pelaksanaan perhitungan kesesuaian antara penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) pada satker perlu dibuat rencana kerja secara terstruktur, sistematis, dan massive (TSM);
 - d. Jangka waktu penyelesaian permohonan pengelolaan BMN dari satker pada setiap unit harus sesuai SOP link guna menjamin kepastian tindak lanjut permohonan satker.
 - e. Dalam rangka mengamankan capaian target lelang perlu dilaksanakan koordinasi antara KPKNL dengan satker, perbankan, Kejaksaan, Kepabeanan dan Cukai, dan masyarakat, serta melaksanakan monev setiap bulan.
 - f. Strategi pencapaian target kinerja Tahun 2023;
 - i. Pencapaian NKO Tahun 2023 diprioritaskan pada perspektif yang memiliki nilai tinggi dan fokus pada capaian IKU yang *controllable*.
 - ii. Setiap IKU yang *controllable* diharapkan dapat dicapai dengan maksimal 120%.
 - g. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* dalam rangka menindaklanjuti surat keputusan/persetujuan pengelolaan BMN.
 - h. Terhadap permohonan BMN Idle, perlu dikoordinasikan secara khusus antara KPKNL dengan satker pemohon.
- 3) Terkait kompetisi-kompetisi yang diikuti:
 - a. Kanwil DJKN Kalbar akan memberikan asistensi kepada KPKNL Singkawang dalam mempersiapkan dan menyusun rencana kerja terkait dengan pencapaian predikat ZI /WBBM.
 - b. Kegiatan Kedai lelang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kepada UMKM agar UMKM dapat menyiapkan produk yang layak dipasarkan.
- 4) Berubahnya struktur organisasi dengan hilangnya seksi pelayanan Penilaian dan Lelang dapat diganti dengan membentuk tim yang dipimpin oleh coordinator.

- 5) Dalam hal membutuhkan penambahan pegawai, unit yang membutuhkan harus memperhitungkan beban kerja yang dimiliki, serta memperhitungkan keahlian pegawai yang tersedia.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan komprehensif kepada seluruh pihak yang terkait atas capaian kinerja dan strategi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, sehingga dapat berguna dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja ini harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dapat meningkatkan kinerjanya dan semakin dirasakan perannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik.





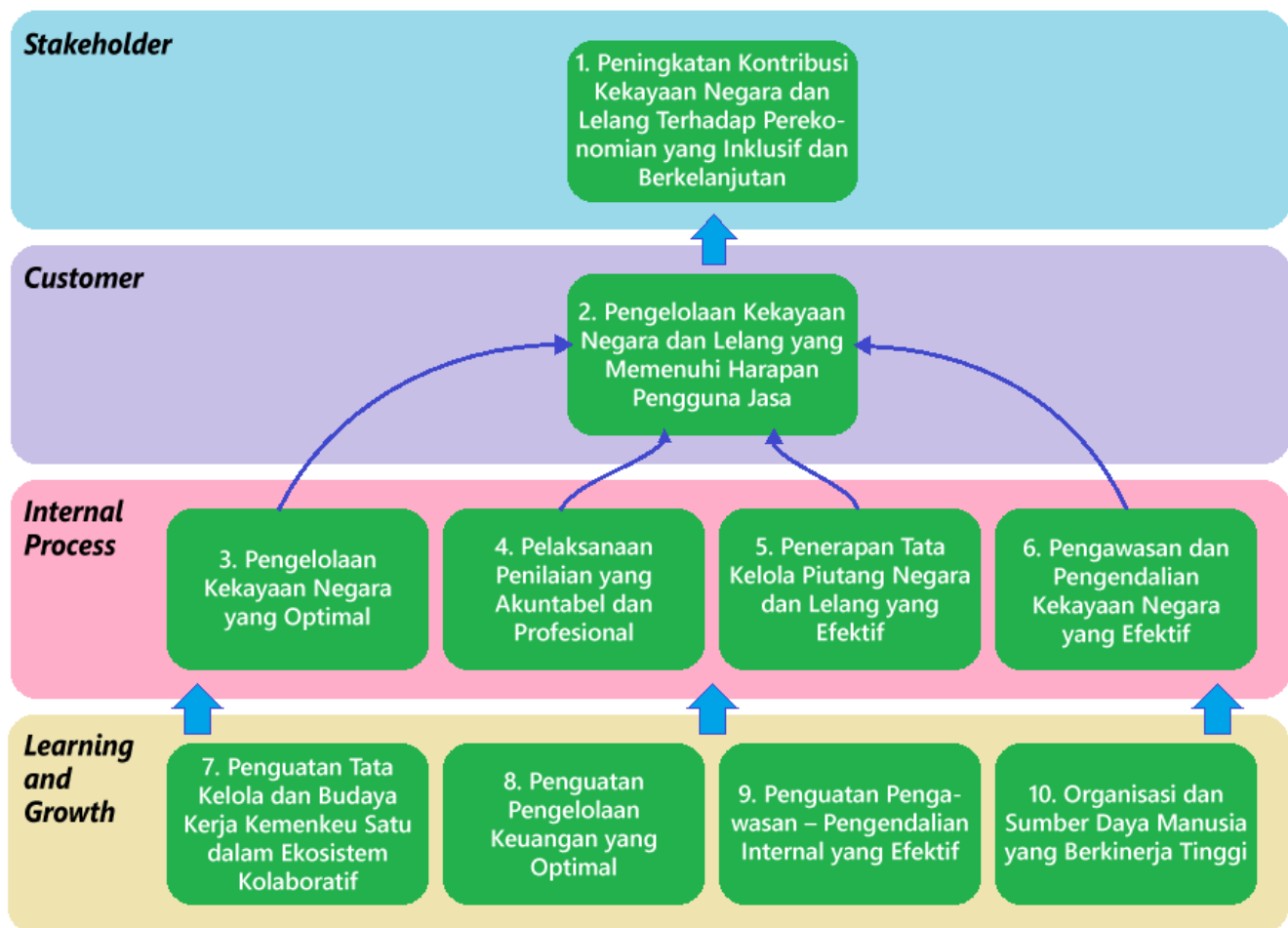
LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK - 23 /KN/2023
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN BARATKEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		3d-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif dan Efisien	70
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>Online</i>	90%
		5a1-N	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	94%
		5a2-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang <i>Online</i>	86%
		5b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	100 (95%)
		7a1-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 dari 4)
		7a2-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (90%)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
9.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9a-CP	Indeks Integritas Organisasi	94,33
		9a1-CP	Indeks Integritas	88,67
		9a2-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)
		9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60
10.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
		10b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80

Kegiatan		Anggaran	
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		Rp 608.254.000	
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	23.117.000
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	6.693.000
3.	Pengelolaan Aset	Rp	574.984.000
4.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	3.460.000
Dukungan Manajemen		Rp	2.699.773.000
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp	18.600.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2.648.733.000
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	26.560.000
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	5.880.000

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Plt. Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara
Kalimantan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Darnadi



RINCIAN TARGET KINERJA

KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KALIMANTAN BARAT

KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2023

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
3b-N	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
3c-N	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3d-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>Online</i>	57%	67%	67%	78,5%	78,5%	90%	90%
	5a1-N Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	5a2-N Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang <i>Online</i>	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
5b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
6a-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
7a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100 (20%)	100 (72,5%)	100 (72,5%)	100 (85%)	100 (85%)	100 (95%)	100 (95%)
	7a1-N Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)	-	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)
	7a2-N Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (20%)	100 (45%)	100 (45%)	100 (70%)	100 (70%)	100 (90%)	100 (90%)
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
9a-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,33	94,33
	9a1-CP Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67

	9a2-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (Level 4)	100 (Level 4)
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		-	-	-	-	-	60	60
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi								
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		-	-	-	-	-	80%	80%
10b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Darnadi



INISIATIF STRATEGIS

KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KALIMANTAN BARAT

KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2023

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian / Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1 : Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan /dimanfaatkan	Q1: Daftar asset yang akan diberdayakan / Dimanfaatkan	Q1 s/d Q4 (12 bulan)	Bidang / Seksi PKN	
				Q2 : Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3 : Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4 : Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan hasil evaluasi kegiatan			

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Darnadi





**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023
NOMOR: 23/KN/2023**

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan *review* akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Jakarta, 30 Januari 2023
Plt. Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Darnadi



DAFTAR RISIKO

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT

KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2023

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1.1 Adanya Pembatalan Lelang	14	8
		1.2 Banyaknya lelang TAP	17	9
		1.3 Satuan kerja tidak menindaklanjuti Persetujuan Pemanfaatan BMN	6	1
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2.1 Jeda waktu yang panjang antara verifikasi dokumen dengan pelaksanaan survei lapangan (penilaian)	9	2
		2.2 Sertifikasi BMN tanah terhambat dan tidak sesuai waktu penyelesaian	19	13
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3.1 Pemanfaatan BMN dilakukan tanpa persetujuan pengelola barang	18	11
		3.2 Penggunaan BMN (TB) oleh pengguna barang tidak sesuai dengan standar barang dan standar kebutuhan yang telah ditetapkan	13	6
		3.3 Rendahnya kualitas berkas piutang Negara (BKPN) yang diterima dari K/ L	22	13
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4.1 Deviasi nilai wajar dengan nilai persetujuan pengelola barang	1	1
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5.1 Rendahnya Usulan Penghapusan Piutang Negara/Daerah	17	9
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6.1 Adanya aset yang berpotensi idle pada satker K/L	5	1
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	7.1 Terbatasnya informasi Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara pada Masyarakat	5	1
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	8.1 Realisasi pencapaian penarikan dana rendah	8	1
		8.2 Rencana <i>output</i> tidak tercapai	8	1
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9.1 Adanya data responden survei yang tidak valid/ <i>update</i>	8	6



10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10.1	Terdapat pegawai yang belum memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	10	5
----	---	------	--	----	---

Jakarta, 30 Januari 2023
Plt. Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Darnadi



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

PERIODE PENILAIAN: 01 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	Darnadi	1	NAMA	Rionald Silaban	
2	NIP	19730515 199403 1 001	2	NIP	19660423 199010 1 001	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama, IV/e	
4	JABATAN	Plt. Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat	4	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	
5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat	5	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
A. UTAMA						
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		100%	Penerima Layanan	
		Persentase Produktivitas Lelang		80%	Penerima Layanan	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase Realisasi Pokok Lelang		100%	Penerima Layanan	
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara		100%	Penerima Layanan	
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		68%	Proses Bisnis	
		Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan		100%	Proses Bisnis	
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)		100%	Proses Bisnis	

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		100%	Proses Bisnis
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		25%	Proses Bisnis
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien		70	Proses Bisnis
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang online		90%	Proses Bisnis
		Sub-IKI 1	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	94%	Proses Bisnis
		Sub-IKI 2	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang <i>Online</i>	86%	Proses Bisnis
		Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN		15%	Proses Bisnis
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		86%	Proses Bisnis
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu		100 (95%)	Penguatan Internal atau Anggaran
		Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 dari 4)	Penguatan Internal atau Anggaran
		Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (90%)	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran		95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran

HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
			Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		100%	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)		Indeks Integritas Organisasi		94,33	Penguatan Internal atau Anggaran
			Sub-IKI 1	Indeks Integritas	88,67	Penguatan Internal atau Anggaran
			Sub-IKI 2	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)	Penguatan Internal atau Anggaran
			Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		60%	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		100%	Penguatan Internal atau Anggaran
			Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		80	Penguatan Internal atau Anggaran
PERILAKU KERJA*						
1	Berorientasi pelayanan					
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.	
2	Akuntabel					
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara				Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran	

PERILAKU KERJA*		
	bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai

PERILAKU KERJA*		
	- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Darnadi

NIP 19730515 199403 1 001

Jakarta, 1 Januari 2023

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

NIP 19660423 199010 1 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

PERIODE PENILAIAN:

1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN
2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	46 pegawai pada unit Kanwil DJKN Kalimantan Barat
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	

1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
6	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
7	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
8	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
11	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	57%	67%	67%	77%	77%	90%	90%
12	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
13	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
14	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100 (20%)	100 (72,5%)	100 (72,5%)	100 (85%)	100 (85%)	100 (95%)	100 (95%)
15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
16	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
17	Indeks integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,33	94,33
18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80%	80%
20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

KONSEKUENSI	
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Darnadi
NIP 19730515 199403 1 001

Jakarta, 1 Januari 2023

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
NIP 19660423 199010 1 001



**PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 10 Februari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Tetik Fajar Ruwandari, S.E., M.M.	NAMA	Rionald Silaban	
NIP	197608221995032001	NIP	196604231990101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	Penguatan Internal atau Anggaran
2.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
3.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Menteri Keuangan) (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	86,91	Penerima Layanan



4.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Produktivitas Lelang	80	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	96,47	Penerima Layanan
6.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	96,42	Penerima Layanan
7.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100	Proses Bisnis
10.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis



11.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	Proses Bisnis
12.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
13.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	90	Proses Bisnis
14.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15	Proses Bisnis
15.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86	Proses Bisnis
16.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	Penguatan Internal atau Anggaran



18.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Integritas Organisasi	94,33	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani



PERILAKU KERJA		
		menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan



PERILAKU KERJA		
		informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

10 Februari 2023

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Tetik Fajar Ruwandari

197608221995032001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Rionald Silaban

196604231990101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 10 Februari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	46 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
2	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko						80	80
3	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	1,91	30	30	60	60	86,91	86,91
4	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	80	80
5	Persentase Realisasi Pokok Lelang	16,47	40	40	70	70	96,47	96,47
6	Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara	6,42	30	30	60	60	96,42	96,42
7	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN		50	50	55	55	68	68



	dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
8	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipkatkan		40	40	60	60	100	100
9	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10	30	30	60	60	100	100
10	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12	32	32	75	75	100	100
11	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	25	25	25	25	25	25
12	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
13	Persentase Pelaksanaan Lelang Online	57	67	67	78,5	78,5	90	90
14	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15	15	15	15	15	15	15
15	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		50	50			86	86
16	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100	100	100	100	100	100	100
17	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
18	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10	50	50	85	85	100	100
19	Indeks Integritas Organisasi						94,33	94,33



	20	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif						60	60
KONSEKUENSI									
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

10 Februari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Tetik Fajar Ruwandari

197608221995032001



Ditandatangani secara elektronik

Rionald Silaban

196604231990101001

